

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tujuan pendidikan yang ideal bagi bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap komponen dan *stakeholder* dalam lembaga pendidikan, serta sistem pendidikan nasional harus bekerja sama secara sinergis dan inovatif untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut.

Upaya inovasi terlihat dari pembaharuan kurikulum sekolah yakni dari kurikulum 2006 (KTSP) menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang dikembangkan dan diterapkan secara bertahap di Indonesia sejak tahun 2013 lalu. Salah satu mata pelajaran yang masih dipertahankan dalam kurikulum 2013 khususnya pada jenjang SMP dan MTs adalah mata pelajaran IPS.

Pendidikan IPS secara ontologis mengkaji disiplin ilmu-ilmu sosial yang diseleksi dari segi struktur keilmuan kemudian diorganisasikan. Secara epistemologis, proses atau metode dalam pendidikan IPS menekankan pada istilah *syntactical structure* (Sapriya, 2009) yang memiliki makna bahwa dalam pendidikan IPS metode yang digunakan sama halnya dengan metode ilmiah yang disusun secara teknis namun terdapat proses berpikir yang lebih tinggi, dan tetap pada satu tujuan yaitu memperoleh kebenaran ilmiah. Pada sudut pandang aksiologi pendidikan IPS memiliki nilai dan makna untuk mewujudkan “kebenaran” yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Somantri, 2001). Secara aksiologis pendidikan IPS menjadi sebagai salah satu media yang memiliki nilai guna untuk mencapai tujuan pendidikan.

Soemantri (2001:74) menyatakan bahwa; “Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan suatu penyederhanaan ilmu-ilmu sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah”. Secara filosofis, pendidikan IPS merupakan filsafat praktik pendidikan, yaitu praktik tentang pendidikan ilmu-ilmu sosial agar peserta didik mampu memahami masalah-masalah sosial dan dapat mengatasinya serta mampu mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupannya (Gunawan, 2013). Jadi, secara umum pendidikan IPS merupakan sekelompok disiplin akademis yang sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan jiwa sosial siswa, selain itu melalui pendidikan IPS diharapkan siswa

lebih peka terhadap kondisi kehidupan manusia, lingkungan manusia serta terkait dengan aspek-aspek kehidupan manusia.

Namun, di sisi lain, dalam penerapannya di sekolah, pendidikan IPS khususnya di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Dikutip dari Al Muchtar (2001) kelemahan yang ada pada pendidikan IPS lebih menonjol dibandingkan keunggulannya, sehingga berimplikasi pada rendahnya mutu pendidikan IPS baik dari segi proses maupun hasilnya, sehingga sangat diperlukan inovasi-inovasi baru untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Menurut Lasmawan (2010:104) terdapat beberapa kritik mendasar yang berkaitan dengan pembelajaran IPS, di antaranya IPS dikatakan sebagai berikut.

(1) mata pelajaran yang hanya berisikan fakta, nama dan peristiwa masa lalu, (2) mata pelajaran yang membosankan, (3) tidak memiliki nilai praktis, (4) sarat materi tanpa makna, (5) tidak ada kontribusi dalam pembangunan masyarakat, (6) pembelajaran hanya bersumber pada buku teks, (7) peserta didik tidak memperoleh makna pembelajaran, (8) guru tidak dapat membelajarkan keterampilan berpikir, (9) sebagian besar guru IPS berasumsi bahwa mengajar IPS hanya sekadar memberikan pengetahuan dan keterampilan pada siswanya secara utuh.

Kondisi pendidikan IPS sekaligus yang menjadi permasalahan mendasar pendidikan IPS di sekolah juga diungkapkan oleh Solihatin (2012), yaitu (1) masih menggunakan model pembelajaran konvensional, (2) tujuan pendidikan IPS sulit dicapai, (3) siswa menjadi objek pembelajaran, (4) *teacher centre*, (5) kurang mendorong dan merangsang siswa untuk mengembangkan potensi inkuiri, (6) materi IPS masih bersifat hafalan, (7) evaluasi hanya sebatas pada kognitif, (8) prestasi siswa tidak dioptimalkan, dan (9) pola interaksi dalam pembelajaran masih bersifat satu arah. Kelemahan pendidikan IPS yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah bersumber dari Susanto (2014), Pendidikan IPS dikatakan

tidak bisa memberikan makna dari apa yang telah dipelajari, sehingga dianggap hanya untuk kepentingan sesaat tanpa ada manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat dan belum menjadikan nilai sosial budaya yang dikembangkan di lingkungan masyarakat menjadi sumber belajar siswa.

Soemantri (2001:39) mengemukakan masalah dalam pembelajaran IPS antara lain; 1) pendekatan ekspositori sangat menguasai keseluruhan proses belajar mengajar, 2) hierarki belajar hampir tidak ditemukan baik dalam penyusunan satuan pelajaran, proses belajar, konstruksi tes maupun buku pelajaran, 3) mata pelajaran ilmu-ilmu sosial di anggap membosankan. Lebih jelas di ungkapkan bahwa kesulitan yang dihadapi dalam praktek pembelajaran IPS yaitu buku pelajaran pada tingkat menengah tidak mengikuti alur pendekatan proses pengambilan keputusan dan pendekatan pemecahan masalah. Materi pelajaran IPS yang digunakan sebagai sumber belajar terbatas pada buku-buku yang telah disediakan pemerintah. Kritik yang sekaligus menjadi permasalahan dasar dalam pendidikan IPS tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem tersebut adalah menciptakan inovasi baru untuk pendidikan IPS, agar mampu menjadi suatu bidang ilmu yang bermanfaat dan memiliki eksistensi di kalangan masyarakat.

Kemajuan ilmu sosial khususnya pendidikan IPS sesungguhnya terletak pada peningkatan mutu yang dilihat dari tiga aspek yaitu apa yang perlu diperbaiki, bagaimana cara memperbaiki dan menghadirkan IPS sebagai ilmu terapan (Abdulah, 2006). Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional

dimaksudkan untuk penerapan metode pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha.

Zaman modern saat ini, perkembangan teknologi dapat memengaruhi sistem yang sudah ada sebelumnya. Indonesia mau tidak mau harus mengikuti arus modernisasi yang perkembangannya begitu cepat.

Diawali dengan ditemukannya mesin uap yang mendorong revolusi industri atau dikenal juga dengan industri 1.0 pada tahun 1784, revolusi industri terus berkembang mulai saat itu. Revolusi industri menyebabkan peralihan penggunaan tenaga manusia dan hewan yang digantikan dengan teknologi mekanik. Industri 1.0 ini berkembang hingga akhir abad 19, yang kemudian pada awal abad 20 digantikan dengan industri 2.0 yaitu produksi massal yang menggunakan tenaga listrik. Pada awal tahun 1970 terjadi revolusi industri ketiga yaitu industri 3.0, pada revolusi ini mulai dikenal penggunaan alat elektronik dan IT untuk proses manufaktur otomatis. Proses manufaktur otomatis ini mulai menggantikan tugas-tugas operator dengan mesin dan robot. Revolusi industri keempat atau industri 4.0 terjadi pada tahun 2012, industri 4.0 memperkenalkan proses produksi *Cyber-Physical*. Industri 4.0 ini mengarah kepada proses manufaktur yang berbasis internet atau jaringan *wireless*. Penggunaan teknologi ini tidak hanya sebatas pada komunikasi, akan tetapi juga mencakup kontrol dan kendali jarak jauh.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam revolusi industri 4.0 ini adalah perubahan demografi dan nilai sosial. Anak-anak mulai usia balita sudah menggunakan gadget dalam kehidupan mereka mulai dari permainan game

sampai pada akses media sosial dan pada sebagian orang atau anak-anak malah menjadi kecanduan penggunaan gawai sehingga kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan. Hal tersebut berdampak pada pertemanan dan rasa sosialisasi semakin rendah yang diakibatkan oleh tidak adanya proses interaksi dengan baik. Terkadang tidak sedikit orang tua yang begitu saja membiarkan anaknya sibuk seharian dengan game atau bersosial media ria tanpa adanya pengawasan.

Era disrupsi ini merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas-aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata, ke dunia maya. Fenomena ini berkembang pada perubahan pola dunia bisnis. Kemunculan transportasi *gadget*/daring adalah salah satu dampaknya yang paling populer di Indonesia. Era disrupsi dijadikan hambatan dan keuntungan bagi para pelaku bisnis yang ada di Indonesia. Karena era disrupsi juga dijadikan sebagai era digitalisasi, dimana seluruh aktifitas/kegiatan menggunakan daring atau media internet. Hal ini menjadikan para pelaku bisnis *market leader* harus pintar mencari celah atau solusi bagaimana cara menjadikan era disrupsi ini sebagai keuntungan bagi mereka. Disrupsi ditandai dengan empat indikator, *simpler* (lebih mudah), *cheaper* (lebih murah), *accessible* (lebih terjangkau), dan *faster* (lebih cepat).

Konsekuensi logisnya dan harus ditanggung bersama-sama adalah perubahan dan pergeseran dalam proses belajar mengajar dan transfer knowledge yang terjadi di jaman sekarang. Implikasi revolusi industri tersebut ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi, mempunyai nilai positif bagi produktivitas hasil kerja dan efisiensi proses produksi. Sisi lain, kompetitifnya dunia kerja yang berujung banyaknya tenaga kerja tidak terpakai akan menjadi masalah sosial serius bagi

pilar stabilitas politik atau ekonomi sebuah negara. menerima perubahan sebagai keniscayaan hidup harus diikuti dengan mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut dengan cara mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi diri melalui sinergitas revolusi industri 4.0.

Perubahan sosial yang oleh Soemarjan (1962: 379) lebih menekankan pada perubahan struktur kelembagaan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya (perubahan nilai-nilai, norma, sikap dan tingkah laku) dan juga perubahan sistem kemasyarakatan dari pola mekanik menjadi organiknya juga dapat terjadi pada era perubahan revolusi industri 4.0.

Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala, ruang lingkup, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian (uncertainty) global, oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, mulai dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang.

Sejalan dengan perkembangan industri 4.0, pemerintah sudah membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya dalam bidang pendidikan guna menangkap peluang perkembangan industri tersebut. Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dimaksudkan untuk penerapan metode pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha.

Realita di lapangan, sistem pembelajaran saat ini belum sepenuhnya secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak dan karakter bangsa termasuk kewirausahaan. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan jumlah pengangguran yang relatif tinggi, jumlah wirausaha yang masih relatif sedikit dan terjadinya degradasi moral.

Angka pengangguran yang masih cukup tinggi merupakan salah satu persoalan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Dari data Badan pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2017 mencapai 7,01 juta orang, turun sekitar 20 ribu orang dibanding Agustus 2016 dan berkurang 10 ribu dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2017 ini sebesar 5,33 persen, atau mengalami penurunan 0,28 persen dibandingkan keadaan Agustus 2016 dan turun sebesar 0,17 persen dibandingkan Februari 2016.

Tingkat pengangguran terbuka untuk kelompok berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan paling tinggi di antara lulusan pendidikan yang lain yaitu 9,27 persen, diikuti Sekolah Menengah Atas (7,03 persen) serta diploma I/II/II 6,35 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SD hanya mencapai 3,54 persen atau paling kecil dibandingkan lulusan lainnya. Hal itu terjadi karena masyarakat berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Berdasarkan wilayah provinsi, tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di wilayah Kalimantan Timur yakni sebesar 8,55 persen dan terendah di Bali sebesar 1,28 persen. BPS juga mencatat bahwa jumlah angkatan



kerja pada Februari 2017 sebanyak 131,5 juta orang atau naik 6,11 juta dibandingkan Agustus 2016 dan naik 3,88 juta dibandingkan Februari 2016.

Melihat data tersebut di atas, maka semua pihak mempunyai peran untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi tingkat pengangguran tersebut, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Tingkat pengangguran tersebut masih sulit untuk mengalami penurunan karena angkatan kerja yang ada saat ini semakin bertambah jumlahnya dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Selain dari pada itu, keterampilan yang dimiliki oleh setiap usia produktif yang siap untuk bekerja masih relatif terbatas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut yaitu melalui kewirausahaan sedini mungkin di dalam lingkup pendidikan, termasuk di SLTP sehingga karakter kewirausahaan siswa dapat terbentuk dari awal.

Suryana (2011;4) mengatakan bahwa;

Peran dan fungsi kewirausahaan dapat dilihat melalui dua pendekatan yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki dua peran, yaitu sebagai penemu (*innovator*) dan perencana (*planer*). Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru, seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya. Sebagai perencana, wirausaha berperan merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan ide-ide dan peluang dalam meraih sukses, menciptakan organisasi perusahaan yang baru, dan lain-lain. Secara makro, peran wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemetaan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Berlakunya sistem desentralisasi berpengaruh pada berbagai tatanan kehidupan, termasuk pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi kebebasan kepada pengelolaan pendidikan. Adanya kebebasan dalam

pengelolaan pendidikan diharapkan mampu menemukan strategi pengelolaan pendidikan yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan output pendidikan yang berkualitas baik dilihat dari kualitas akademik maupun non akademik. Kualitas akademik yang dimaksud adalah kualitas peserta didik yang terkait dengan bidang ilmu, sedangkan kualitas non akademik berkaitan dengan kemandirian untuk mampu bekerja di kantor dan membuka usaha/lapangan kerja sendiri. Dengan kata lain lulusan pendidikan diharapkan memiliki karakter, sikap, minat, dan perilaku wirausaha yang tinggi.

Hasil observasi awal di SMPK Santo Paulus Singaraja yang sudah menerapkan kurikulum 2013 untuk kelas VII dan KTSP di kelas VIII dan IX. Dalam penerapannya ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran IPS yang tentunya permasalahan tersebut merupakan permasalahan umum yang sering dan masih terjadi dalam praktek pembelajaran IPS. Permasalahan tersebut antara lain; 1) guru yang mengajar IPS bukanlah lulusan pendidikan IPS, melainkan lulusan pendidikan geografi, 2) model pembelajaran yang digunakan masih bersifat konservatif, 3) sumber belajar yang digunakan oleh guru terbatas pada buku teks atau LKS, 4) aspek materi yang digunakan oleh guru ditulis dalam RPP dan terbatas pada materi-materi yang ada di dalam buku teks tersebut, dan guru tidak mengembangkan materi tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa atau kondisi lingkungan sekolah, 5) guru juga belum mengajar mata pelajaran IPS yang semestinya dikembangkan dalam bentuk terpadu.

Tujuan pendidikan IPS dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan

lingkungannya dapat menggunakan sebuah lembaga keuangan yaitu koperasi. Koperasi Kredit Swastiastu merupakan koperasi yang berada di bangunan yang sama dengan SMPK Santo Paulus Singaraja. Tujuan pendidikan IPS dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan mengenai memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan dapat dilihat dan mengadopsi dari nilai-nilai sosial ekonomi yang ada pada Koperasi Kredit Swastiastu.

Berdasarkan analisis konseptual dan kondisi empiris di atas, penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Koperasi Kredit Swastiastu sebagai sumber pembelajaran nilai sosial ekonomi pada matapelajaran IPS di SMPK Santo Paulus Singaraja”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan pemaparan pada latar belakang penelitian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian, sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi pembelajaran IPS di SMPK Santo Paulus Singaraja?
2. Nilai-nilai sosial ekonomi apa yang berkembang di Koprasi Kredit Swastiastu yang dapat diintegrasikan menjadi sumber belajar dalam pembelajaran IPS?
3. Bagaimana efektivitas model pengintegrasian nilai-nilai sosial ekonomi Koperasi Kredit Swastiastu sebagai sumber belajar IPS di SMPK Santo Paulus Singaraja terhadap hasil belajar siswa?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi pembelajaran IPS di SMPK Santo Paulus Singaraja.

2. Mengetahui nilai-nilai sosial ekonomi Koperasi Kredit Swastiastu yang dapat diintegrasikan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran IPS.
3. Menganalisis efektivitas model pengintegrasian nilai-nilai sosial ekonomi Koperasi Kredit Swastiastu sebagai sumber belajar IPS di SMPK Santo Paulus terhadap hasil belajar siswa.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki kebermanfaatan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Temuan dan hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis terkait pemanfaatan koperasi sebagai sumber belajar pengayaan materi dalam pembelajaran khususnya IPS di tingkat SMP, serta dapat dijadikan sebagai referensi secara teoretis mengenai penelitian mengenai pengayaan materi ajar khususnya pada pendidikan IPS.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Peneliti Bidang Pendidikan IPS

Kebermanfaatan penelitian ini terhadap peneliti lain adalah memberikan informasi mengenai penelitian sejenis khususnya pada bidang pendidikan IPS, sehingga kekurangan yang ada dapat secara bersama-sama dikembangkan dan diperbaiki kembali ke arah yang lebih baik. Disisi lain,

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut khususnya mengenai pengayaan materi dalam pembelajaran IPS.

## 2) Guru IPS

Bagi guru IPS khususnya guru IPS tingkat SMP/MTs, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pertimbangan dan pembanding untuk pengayaan materi ajar. Materi ajar yang dikembangkan pada penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai tambahan materi ajar selama masih sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam silabus. Manfaat lain diharapkan penelitian ini menginspirasi guru-guru untuk melaksanakan penelitian khususnya dalam hal pemanfaatan koperasi sebagai pengayaan materi ajar.

## 3) SMPK Santo Paulus Singaraja

Temuan dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi SMPK Santo Paulus Singaraja sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian lain baik dalam bidang studi IPS maupun bidang studi lainnya. Karena, begitu banyaknya kantor pelayanan di sekitar siswa dan sekolah salah satunya koperasi, yang sangat berguna dan layak untuk diintegrasikan dalam materi pembelajaran guna memperkenalkan dan mengamalkan nilai sebagai dasar untuk membentuk peserta didik yang mampu bertindak sesuai budaya lokal dan memiliki wawasan yang luas.

## 4) Bagi Pemerintah dalam Bidang Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah bahwa keadaan penduduk Indonesia yang multietnis, agama dan

budaya mengharuskan pendidikan di sekolah formal harus mampu menciptakan masyarakat yang mampu bersaing secara global, namun masih berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan. Selain itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia dan Bali khususnya.

